

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya fenomena globalisasi menimbulkan banyak dampak termasuk adanya pergeseran dalam hubungan internasional dimana negara bukan lagi menjadi satu-satunya aktor penting dalam pembuatan kebijakan dalam mencapai kepentingan. Perkembangan ini terjadi karena kebutuhan untuk mencapai kepentingan nasional secara khusus yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Kemunculan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional menjadikan format diplomasi berkembang menjadi “*the foreign policy and non-central government*” yang juga disebut sebagai paradiplomasi.¹ Kehadiran paradiplomasi memberikan kesempatan kepada aktor selain pemerintah pusat seperti kelompok, organisasi, individu, maupun pemerintah daerah untuk mencapai kepentingannya masing-masing.

Pemerintah daerah muncul sebagai aktor baru dalam hubungan internasional dan semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada *Local Government to Local Government*, bahkan *Person to Person* untuk berinteraksi dan berdiplomasi secara langsung.² Hal ini pula yang kemudian menyebabkan pemerintah daerah semakin gencar dalam melakukan pembangunan. Terdapat

¹ Takdir Ali Mukti. 2013. *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinsi Press

² Buku Panduan Umum Tata Cara Hub dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Diakses melalui <http://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Panduan%20Umum%20Tata%20Cara%20Hub%20dan%20Kerjasama%20Luar%20Negeri%20oleh%20Pemerintah%20Daerah.pdf> (26/04/2018)

banyak bentuk kerjasama antara dua kota di dalam negara yang berbeda salah satunya yaitu kerjasama *Sister City*.

Kerjasama *Sister City* merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota di satu negara dengan Pemerintah Kota di negara lainnya yang berupaya mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa yang berbeda juga merupakan bentuk kerjasama yang konkrit serta saling menguntungkan. Kerjasama ini juga biasanya dikenal dengan nama *Twining City* yang dalam bahasa Indonesia berarti kota kembar, konteks kerjasama juga bersifat luas dan bersifat jangka panjang.³ Persetujuan kerjasama antara dua kota ini biasanya dilatarbelakangi oleh kemiripan karakteristik antara dua kota di negara yang berbeda. Donal Bell Souder & Shana Bredel dalam *A Study of Sister City Relations*, membagi kerjasama *sister city* dalam beberapa bidang yaitu kerjasama dalam bidang budaya, akademik, pertukaran informasi, dan ekonomi.⁴

Benua Eropa merupakan wilayah yang pertama kali menggunakan konsep *Sister City* tepatnya diantara Kota Keighley, Yorkshire Barat, Inggris dengan Kota Poix Du Nord, Perancis pada tahun 1920. Namun, penandatanganan kerjasama *sister city* secara resmi antara kedua kota tersebut baru dilaksanakan pada tahun 1986. Kemudian konsep ini berkembang ke negara-negara di

³ Rizki Tegar Sembada. 2016. *Peluang dan Tantangan Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Hamamatsu (2014-2015)*. Skripsi. Yogyakarta: Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses melalui <http://thesis.umy.ac.id/index.php?opo=bibliography&id=69419> (26/04/2018)

⁴ Rio Rusandi. 2017. *Kerjasama Sister City Jakarta-Belin dalam Bidang Kebudayaan Pada Tahun 2011-2014*. Diakses melalui [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/eJournal%20Rio%20Rusandi%20\(08-31-17-05-08-51\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/eJournal%20Rio%20Rusandi%20(08-31-17-05-08-51).pdf) (29/09/2019)

berbagai belahan dunia. Konsep *sister city* ini semakin berkembang sejak tahun 1956 dimana Presiden Amerika Serikat saat itu, Dwight Elisenhower menyatakan bahwa kerjasama *sister city* ini penting untuk menciptakan keterikatan antara orang-orang dengan budaya berbeda untuk saling menghargai sehingga mengurangi kemungkinan munculnya konflik melalui *American Smart City Program*.⁵

Di Indonesia, pembentukan kerjasama *sister city* berpedoman pada surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.⁶ Meskipun begitu, kewenangan mengelola potensi daerah atau otonomi daerah di Indonesia sudah ada pasca kemerdekaan Indonesia yang diatur pada UU Nomor 1 tahun 1945. UU mengenai otonomi daerah tersebut terus mengalami perkembangan dengan dilakukannya revisi hingga 2004 dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.⁷ Dalam melakukan kerjasama *sister city*, terdapat pedoman yang tertulis dalam peraturan dan tata tertib administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Perencanaan dan Pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri juga harus

⁵ *Ibid...*

⁶ Bagian Kerjasama Kota Bandung. Diakses melalui <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city> (25/04/2018)

⁷ Sani Safitri. 2016. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Diakses melalui <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/download/4804/2550> (29/09/2019)

diikuti dengan adanya kemampuan daerah tersebut dalam hal keuangan, ketersediaan SDM serta sesuai dengan potensi dan kebijakan mitra asing.⁸

Kota-kota di Indonesia sangat banyak yang sudah tercatat melakukan kerjasama *Sister City* dengan kota-kota di negara lainnya. Indonesia telah melaksanakan kerjasama *sister city* semenjak tahun 1993, setidaknya terdapat 47 pemerintahan kota dari 33 provinsi Indonesia telah melakukan hubungan kemitraan *sister city* ini.⁹ Kota/Daerah tentunya terus berupaya memanfaatkan hubungan kerjasama ini memacu pertumbuhan dan pembangunannya masing-masing.

Salah satu kota di Indonesia yang gencar berupaya meningkatkan pembangunannya melalui kerjasama *sister city* adalah Kota Bandung. Kerjasama yang dilakukan Kota Bandung ini pertama kali dilaksanakan tahun 1960, dimana Kota Braunschweig, Jerman menjadi mitra kerjasamanya. Bentuk kerjasama ini sekaligus menjadi salah satu bentuk kerjasama tertua di Indonesia.¹⁰ Salah satu tujuan Kota Bandung menjalin kerjasama *sister city* dengan banyak kota di dunia adalah untuk meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang.¹¹ Seiring perkembangannya, Kota Bandung melanjutkan kerjasama *Sister City* dengan kota-kota lainnya. Adapun kota-kota yang telah

⁸ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri (28/04/2018)

⁹ Andi Oetomo. *Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City*. Diakses melalui http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/edisi3i.pdf (28/04/2018)

¹⁰ H. Apriliani. 2017. *Hubungan Kerjasama Kota Kembar (Sister City) Antara Bandung dan Seoul Tahun 2015-2017*. Skripsi. Yogyakarta: Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17028/H.%20BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y> (18/02/2019)

¹¹ Bagian Kerjasama... *Op.cit* (28/04/2018)

menjalin kerjasama *sister city* dengan Kota Bandung sampai saat ini terhitung 14 kota dari negara-negara yang berbeda.

Agar tercapainya tujuan peningkatan pembangunan dalam berbagai bidang tersebut, kerjasama ini harus diikuti dengan berbagai program kegiatan yang tetap serta terencana dengan baik. Adapun beberapa bidang yang menjadi bidang kerjasama *Sister City* diantaranya (1) Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri, dan Pariwisata; (2) Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi; (3) Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga; (4) Bidang-bidang lain yang kemudian akan disetujui oleh kedua belah pihak.¹²

Sejak terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung, Misi kota Bandung terdiri dari 4 pokok yaitu (1) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan; (2) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan melayani; (3) Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing, dan (4) Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.¹³ Dalam upaya mewujudkan misi pertama, Kota Bandung menjalin kerjasama *Sister City* dengan salah satu kota di Korea Selatan yaitu Kota Seoul. Pemerintah Kota Bandung melihat Kota Metropolitan Seoul sebagai kota yang berhasil dalam proses penataan kota yang baik dan restorasi kawasan kumuh menjadi

¹² Bentuk Kerjasama,, *Op.cit*

¹³ Pemerintah Kota Bandung. Visi dan Misi Kota Bandung. Diakses melalui <https://portal.bandung.go.id/posts/2005/08/01/ORI7/visi-dan-misi> (24/01/2019)

kawasan terbuka hijau.¹⁴ Sehingga Seoul adalah mitra yang dapat membantu Kota Bandung mewujudkan misinya dalam pokok pertama.

Kerjasama antara Bandung dan Seoul ini secara teori merupakan kerjasama *sister city*. Namun, menurut pemerintah Kota Bandung, sebenarnya kerjasama ini merupakan kerjasama kota sahabat. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kesamaan karakteristik budaya, sosial, maupun geografi antara Kota Bandung dan Kota Seoul.¹⁵

Pada Mei 2015, Kerjasama antara Bandung dan Seoul pertama kali diawali dan ditandatangani oleh kedua belah pihak melalui *Letter of Intent* (LoI). Setahun setelah penandatanganan LoI tersebut, KBRI Seoul menyatakan bahwa kesepakatan antara Pemerintah Kota Bandung dan Seoul ditindaklanjuti dengan melangsungkan kerjasama *Sister City* dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Ridwan Kamil dan Park Wonsoon pada 7 Oktober 2016 di City Hall, Seoul, serta disaksikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea John A. Prasetyo. Kedua Walikota menyepakati untuk melakukan kerjasama dan pertukaran informasi yang berfokus pada pengembangan *Smart City* dalam beberapa bidang, yaitu: Ekonomi Perkotaan, Perencanaan Tata Kota, Mode Transportasi Perkotaan, dan *E-government*.¹⁶

¹⁴ H. Apriliani. *Op.cit*

¹⁵ Wawancara penulis dengan Bagian Kerjasama Kota Bandung, Kristin, Bandung, 3 Mei 2019

¹⁶ Kementerian Luar Negeri. *Bandung dan Seoul Tandatangani MoU Kerjasama*. Diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/seoul/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Bandung-dan-Seoul-Tandatangani-MoU-Kerjasama-.aspx> (01/05/2018)

Penandatanganan ini juga ditindaklanjuti karena datangnya para pengusaha Korea yang dijemput oleh ASEAN-Korea Center. Rombongan tersebut disambut langsung oleh Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung. Baginya, ini merupakan salah satu jalan bagi Kota Bandung agar bisa mengoptimalkan pembangunan, khususnya infrastruktur. Pemerintah Kota Bandung dalam pertemuan tersebut mengaku telah memiliki solusi untuk menjadikan Bandung menjadi kota juara namun masih memiliki keterbatasan dalam mewujudkannya. Delegasi para pengusaha Korea Selatan tersebut mengunjungi Kota Bandung dengan alasan yang berkaitan dengan program *smart city*. Para pengusaha tersebut merasa dapat membantu untuk mengembangkan program tersebut melalui pembangunan infrastruktur serta memenuhi kebutuhan Kota Bandung lainnya. Selain melalui ASEAN-Korea Centre, Kota Bandung juga berupaya melibatkan pihak swasta melalui kunjungan langsung dan melalui *Korea International Cooperation Agency* (KOICA).¹⁷

Dalam upaya mengembangkan tata kelola perkotaan secara maksimal, Kota Bandung tidak hanya melibatkan pihak pemerintah daerah dari Korea Selatan, tetapi juga berusaha melibatkan pihak-pihak privat Korea Selatan melalui kerjasama *sister city*. Hal ini dilakukan Kota Bandung dengan menerapkan skema pembiayaan *Public Private Partnership* (PPP) untuk

¹⁷ Randyrey. 2017. *Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kota Seoul, Korea Selatan, Berbuah Panjang*. Diakses melalui <https://ppid.bandung.go.id/2017/01/kerja-sama-antara-pemerintah-kota-bandung-dengan-kota-seoul-korea-selatan-berbuah-panjang/> (01/05/2018)

mendanai proyek-proyek pembangunan Kota Bandung khususnya dalam pembangunan tata kelola perkotaan.¹⁸

Kerjasama *Sister City* ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti mengingat Seoul sebagai kota metropolitan terbesar Korea Selatan merupakan kota yang berhasil dalam proses penataan kota yang baik dimana kota Seoul sangat berpotensi untuk membantu Bandung mewujudkan salah satu misinya yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Melalui kerjasama *sister city* ini, Kota Bandung berupaya melibatkan perusahaan-perusahaan swasta Korea Selatan dalam pembangunan tata kelola perkotaan Kota Bandung dengan skema *Public Private Partnership*. Inilah yang menjadi alasan penulis membahas hubungan kerjasama Bandung-Seoul dengan judul “Strategi Kota Bandung dalam Tata Kelola Perkotaan Melalui Kerjasama *Sister City* Bandung-Seoul”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Strategi Kota Bandung dalam Tata Kelola Perkotaan Melalui Kerjasama *Sister City* Bandung-Seoul?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

¹⁸ Dian Rosadi. 2016. *Pemkot Bandung akan bangun PPP Center untuk jaring investor luar negeri*. Diakses melalui <https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/pemkot-bandung-akan-bangun-ppp-center-untuk-jaring-investor-luar-negeri-160615j.html> (29/09/2019)

1. Mengetahui strategi Kota Bandung dalam tata kelola perkotaan berbasis *smart city* melalui kerjasama *sister city* dengan Kota Seoul, Korea Selatan.
2. Melihat penerapan Public Private Partnership dalam Kerjasama *sister city* Bandung-Seoul.

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan untuk:

1. Bagi kajian Hubungan Internasional, memberikan sumbangsih untuk pengembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam kajian Intermetistik seperti paradiplomasi, *sister city*, serta isu-isu internasional yang terkait dengan isu domestik lainnya.
2. Kepada masyarakat agar dapat membantu masyarakat untuk lebih mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi Strategi Kota Bandung dalam Pengelolaan Tataan Kota Melalui Kerjasama Sister City Bandung-Seoul serta mengetahui program-program yang terdapat didalamnya.
3. Bagi penulis, dapat menambah wawasan langsung tentang pelaksanaan kerjasama internasional dan domestik khususnya *sister city* Bandung dan Seoul. Harapan besar bagi penulis tulisan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dengan tersedianya informasi-informasi mengenai program kerjasama *sister city*.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang berkaitan dengan penelitian ini ditulis oleh Rizki Tegar Sembada dengan judul penelitian **“Peluang dan Tantangan Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu (2014-**

2015)".¹⁹ Dalam penelitiannya, penulis menyebutkan bahwa konsep otonomi daerah dan konsep *paradiplomacy* menjadi konsep yang dapat menggambarkan isi penulisannya. Pertimbangan dalam melakukan kerjasama juga dilihat dari adanya potensi kota. Kota Bandung memiliki alasan yang mendasar dan mengakar dalam perjalanannya melakukan kerjasama dengan Kota Hamamatsu, Jepang. Sisi historis menjadi pertimbangan Kota Bandung dalam melakukan kerjasama. Setiap terdapat peluang, pasti terdapat pula tantangan yang mengikutinya.

Tantangan kerjasama *sister city* antara Bandung dan Hamamatsu berawal dari segi format MoU di Indonesia yang masih kurang detail, selain itu ada juga masalah protokoler dimana prosedur dan mekanisme masih terjalin sangat lambat dan tidak efisien. Masalah SDA juga menjadi hambatan tersendiri bagi Kota Bandung dalam upaya melakukan kerjasama, bahkan sosialisasi mengenai *sister city* masih sangat kurang dilakukan kota Bandung kepada masyarakat. Walaupun begitu, Kerjasama *sister city* juga diharapkan mampu memperluas kerjasamanya dalam berbagai bidang atau sektor. Selain itu, ada pula peluang yang dapat diambil oleh Kota sehingga hal inilah yang mendorong Kota Bandung Bandung dalam melakukan kerjasama. Yang menjadikan penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian kali ini adalah adanya persamaan penelitian yaitu *sister city* yang dilakukan oleh Kota Bandung. Namun, penelitian kali ini membahas kerjasama Bandung dengan kota Seoul sedangkan penelitian tersebut melihat kerjasama Bandung dengan

¹⁹ Rizki Tegar Sembada... *Op.cit.*, (Thesis Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Hamamatsu. Adapun penelitian ini melihat sisi strategi Kota Bandung dalam melakukan kerjasama sedangkan penelitian tersebut berfokus pada sisi peluang serta tantangan Bandung dalam melaksanakan kerjasama kota kembar dengan Kota Hamamatsu.

Penelitian selanjutnya berasal dari penulis yang bernama Mariyo Saputra (2017) yang berjudul **“Implementasi Kerjasama Sister City Bandung-Suwon terhadap Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Kota Bandung”**.²⁰

Di dalam penelitian tersebut, penulis mempersempit pembahasan yang dikhususkan membahas bagaimana implementasi kerjasama *sister city* Bandung-Suwon terhadap pembangunan pendidikan, budaya serta pariwisata di Kota Bandung. Konsep yang menjadi kerangka dari penelitian ini yaitu teori kerjasama internasional, konsep *sister city*, dan konsep pembangunan.

Dalam implementasinya, pembangunan di kota Bandung khususnya sosial ekonomi *sister city* antara Bandung-Suwon memiliki beberapa kendala sehingga kedua kota tersebut harus memiliki banyak pertimbangan agar kerjasama tersebut berbuah saling menguntungkan. Munculnya peluang dan tantangan menjadi dasar bagi kedua pemerintahan kota dalam mengatur strategi kebijakan yang akan dijalankan. Disamping itu, penulis juga mengaitkan *Multi-track Diplomacy* dalam frase kerjasama *Sister City* Bandung-Suwon sebagai pokok analisis dalam penulisan. Penelitian tersebut memiliki persamaan subyek pembahasan dengan penelitian kali ini yaitu Kota

²⁰ Mariyo Saputra. 2017. *Implementasi Kerjasama Sister City Bandung-Suwon terhadap Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Kota Bandung*. Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/31461/> (Thesis sarjana, Universitas Pasundan)

Bandung. Meskipun sama-sama membahas kerjasama *sister city* Kota Bandung dengan salah satu Kota di Korea Selatan, penelitian tersebut berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi Kota Bandung dalam kerjasama *sister city* dengan Kota Suwon. Sedangkan, dalam penelitian kali ini penulis berfokus pada perkembangan tata kelola perkotaan Kota Bandung dalam kerjasama *sister city* Bandung dengan Seoul.

Kemudian penelitian yang juga menjadi penelitian ketiga yang terkait dengan penelitian kali ini adalah **“Substansi Kerjasama Luar Negeri *Sister City* Kota Surabaya-Xiamen”** oleh Irdayanti.²¹ Dalam penelitiannya, penulis berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan substansi dan hasil kerjasama antar pemerintah daerah Surabaya dengan Xiamen, China. Penulis juga menjelaskan bahwa tren kerjasama kota kembar (*sister city*) disebabkan oleh adanya kepentingan antar daerah otonom bertetangga. Terciptanya kerjasama ini akibat kondisi desentralisasi yang menciptakan sebuah disparitas sumber daya dan potensi daerah sehingga mendorong daerah untuk melakukan kerjasama khususnya dengan kota lain di negara lain.

Penulis juga melihat bahwa kerjasama *sister city* antara Surabaya dan Xiamen menunjukan kerjasama yang efektif dengan diimplementasikannya kesepakatan yang telah dibentuk dengan hasil peningkatan kapasitas serta pengembangan potensi kota dan teknologi. Penelitian tersebut terkait dengan penelitian kali ini karena dalam penelitian tersebut membahas pengembangan

²¹ Irdayanti. 2014. *Substansi Kerjasama Luar Negeri Sister City Kota Surabaya-Xiamen*. Diakses melalui <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/810> (Jurnal, Universitas Islam Negeri)

potensi kota dan teknologi, dimana dalam penelitian kali ini juga akan membahas pengembangan tata kelola perkotaan dan teknologi berbasis *smart city*. Namun, penelitian tersebut melihat kerjasama yang dilakukan oleh Surabaya dan Xiamen, sedangkan penelitian kali ini melihat kerjasama yang dilakukan oleh Bandung dan Seoul.

Penelitian keempat yang terkait dengan penelitian ini juga membahas mengenai kerjasama *sister city* yang dijalankan oleh Bandung dengan salah satu kota di Jerman yaitu Braunschweig dengan judul “ **Implementasi Kerjasama Sister City Bandung-Braunschweig (2000-2013)**” yang di tulis oleh Hendri Renola Fitri dan Faisyal Rani (2013).²² Didalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa kerjasama *Sister City* harus diikuti dengan banyak pertimbangan sebelum benar-benar dilakukan. Hal-hal tersebut meliputi adanya kesamaan karakteristik dan kepentingan bersama.

Dalam kerjasama *sister city* Bandung-Braunschweig terdapat kesamaan karakteristik kedua kota yang dapat membawa dampak positif dalam mencapai kepentingan bersama. Sehingga pada prosesnya mampu melahirkan hasil yang lebih efektif dan efisien serta mempermudah terjalannya kerjasama dalam jangka waktu yang panjang dan proses perwujudan tujuan bersama, karena adanya kesamaan dalam bidang-bidang tertentu yang dapat membentuk harmonisasi dalam pelaksanaan kerjasama. Apabila penelitian tersebut membahas tentang implementasi kerjasama *sister city* Kota Bandung,

²² Hendri Renola Fitri dan Faisyal Rani. 2013. *Implementasi Kerjasama Sister City Bandung-Braunschweig (2000-2013)*. Diakses melalui <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1798> (Jurnal, Universitas Riau)

penelitian kali ini lebih berfokus pada melihat strategi kota Bandung dalam melakukan kerjasama *sister city*. Adapun dalam penelitian tersebut penulis membahas kerjasama yang dilakukan Kota Bandung dengan Braunschweig, sedangkan penelitian kali ini membahas kerjasama Kota Bandung dengan Seoul.

Selain menjalin kerjasama *Sister City* dengan Kota Bandung, Seoul juga merupakan saudara *Sister City* dari Ibu Kota Indonesia yaitu Jakarta. Kerjasama ini kemudian diteliti oleh penulis yang bernama Atika Dian Anggraini yang berjudul **“Kinerja Pemerintah DKI Jakarta Dalam Kerjasama *Sister City* dengan Seoul di Bidang Perdagangan”**.²³ Dalam penelitian tersebut, penulis ingin melihat bagaimana hasil evaluasi kinerja Pemerintah DKI Jakarta dalam kerjasama *sister city* dengan Seoul khususnya pada bidang perdagangan. Evaluasi dalam penelitian ini juga digunakan untuk melihat apakah kerjasama di bidang perdagangan antara kedua negara mengalami peningkatan maupun penurunan. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah penilaian kinerja yang tidak dapat didasarkan hanya pada pendapat melainkan harus dengan fakta. Sehingga, dalam penelitian tersebut untuk melihat fakta digunakan tiga variabel yaitu variabel input, proses, dan output. Pengukuran yang dilakukan untuk menilai kinerja Pemerintah DKI Jakarta dalam menjalani kerjasama dengan Seoul menghasilkan hasil akhir yang cukup efektif.

²³ Atika Dian Anggraini. 2017. *Kinerja Pemerintah DKI Jakarta Dalam Kerjasama *Sister City* dengan Seoul di Bidang Perdagangan*. Diakses melalui <http://eprints.upnyk.ac.id/12107/> (Thesis, Universitas UPN “Veteran”)

Terlepas dari hambatan yang dihadapi oleh pemerintah DKI Jakarta, kerjasama tetap membuahkan hasil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian kali ini, penulis membahas kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh Bandung dan Seoul. Namun, selain berkerjasama dengan Bandung, Seoul juga melakukan kerjasama dengan kota lain di Indonesia yaitu Ibukota DKI Jakarta yang dimana kerjasama Seoul-DKI Jakarta dibahas dalam penelitian tersebut. Adapun penulis dalam penelitian tersebut berfokus pada pembahasan kerjasama di bidang perdagangan, sedangkan penelitian kali ini berfokus pada tata kelola perkotaan.

“Peluang dan Tantangan Kerjasama *Sister City* Kota Baubau-Seoul” adalah judul dari penelitian selanjutnya yang menjadi penelitian terdahulu penulis dalam penelitian kali ini.²⁴ Penelitian tersebut ditulis oleh Muhammad Nurckhalik Djiirimu yang bermaksud menggambarkan situasi sejauh mana kerjasama yang dijalin antara Pemerintah Kota Baubau dan Pemerintah Kota Seoul berdasarkan poin-poin kerjasama yang tertulis dalam MoU. Kemudian, penulis pada penelitian tersebut melihat efektivitas, peluang serta tantangan melalui poin-poin kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Disamping itu, penulis mengaitkan diplomasi budaya (*multitrack diplomacy*) dalam bingkai kerjasama *sister city* Kota Baubau-Seoul sebagai kunci analisis dalam penulisan.

²⁴ Muhammad Nurckhalik Djiirimu. 2013. *Peluang dan Tantangan Kerjasama Sister City Kota Baubau-Seoul*. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4800> (Skripsi sarjana, Universitas Hasanuddin)

Dengan penggunaan konsep *Decision Making Theory*, *Multi-track Diplomacy*, serta *Sister City*, penulis menjelaskan beberapa peluang dan tantangan dalam kerjasama tersebut diantaranya penerapan kebudayaan Korea melalui kerangka kerjasama *sister city* dengan misi menyelamatkan bahasa suku Cia-Cia (salah satu suku di wilayah Kota Baubau) yang dianggap beberapa pakar linguistik terancam punah. Sehingga, antara suku Cia-Cia dan hangeul merupakan dua hal penting yang merekatkan kerjasama antara Pemerintah Kota Baubau dan Seoul serta beberapa kerjasama dengan NGO Korea.

Selain DKI Jakarta dan Bandung, Seoul lebih dulu melakukan kerjasama *sister city* dengan Bau-Bau karena terdapat kesamaan budaya yang dimana dibahas dalam penelitian tersebut. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian kali ini karena penelitian kali ini melihat strategi Kota Bandung dalam melakukan kerjasama *sister city* dengan Seoul, sedangkan penelitian tersebut melihat peluang dan tantangan yang dihadapi Bau-Bau dalam melakukan kerjasama *sister city* dengan Seoul.

Penulis bernama Selvinda Novintan Putri melakukan penelitian berjudul **“Kegagalan Kerjasama Sister City Kota Semarang dengan Kota Beihai”**.²⁵ Dalam kerjasama antara kedua kota tersebut terdapat salah satu poin kerjasama yaitu Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Semarang. Oleh karena itu, penelitian

²⁵ Selvinda Novintan Putri dan Muhammad Adnan. 2017. *Kegagalan Kerjasama Sister City Kota Semarang dengan Kota Beihai*. Diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16119> (Jurnal, Universitas Diponegoro)

tersebut berkaitan dengan penelitian kali ini dimana terdapat kesamaan poin kerjasama yaitu tata kelola perkotaan. Penelitian menjelaskan bahwa alasan Pemerintah Kota Semarang dalam menjalin kerjasama adalah karena adanya kesamaan karakteristik antara Semarang dan Beihai. Adapun Kota Semarang memiliki keterikatan dan ketertarikan pada budaya kerja yang ada di China, salah satunya Kota Beihai. Pada tahun 2008, telah dilakukan penandatanganan MoU kerjasama *sister city* antara kedua kota, namun setelah itu, kedua kota tidak melakukan kelanjutan penerapan kerjasama sehingga kerjasama antara keduanya sempat terhenti. Hal yang menjadi penyebab terhentinya kerjasama adalah karena tidak adanya inisiatif untuk melaksanakan gagasan ide untuk program keberlanjutan kerjasama dari pihak Kota Semarang. Sedangkan dari pihak Beihai tidak lain adalah karena faktor kebijakan pemimpin pada saat itu.

Kerjasama yang dilakukan oleh Semarang dan Kota Beihai dalam penelitian tersebut berfokus pada Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Semarang sehingga menjadikan penelitian tersebut terkait dengan penelitian kali ini. Dalam kerjasama Kota Bandung dan Seoul dalam melakukan *sister city* juga terdapat poin kerjasama Tata Ruang atau Tata Kelola Perkotaan. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini ialah dalam penelitian tersebut penulis berfokus pada kegagalan kerjasama antara Semarang dan Beihai, sedangkan dalam penelitian kali ini penulis melihat sisi strategi Kota Bandung dalam melakukan kerjasama dengan Seoul.

Kerjasama *sister city* juga pernah dimanfaatkan oleh kota Surabaya untuk menjadikan kotanya sebagai kota *Green City*. Upaya kerja sama *sister city* ini

kemudian diteliti oleh seorang penulis bernama Inggang Perwangsa Nuralam dengan judul penelitian **“Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City dalam Menciptakan Surabaya Green City”**.²⁶ Kota yang menjadi mitra kerjasama surabaya dalam *sister city* tersebut adalah Kota Kitakyushu, Jepang. Dalam penelitian tersebut, penulis mempertanyakan sejauh mana konsep *sister city* dapat membantu kota Surabaya menjadi kota yang tangguh serta responsif terhadap permasalahan lingkungan.

Kota Kitakyushu dulunya terkenal sebagai kota asap, dan memiliki permasalahan yang sama dengan kota Surabaya yaitu berkaitan dengan sampah dan tercemarnya air sungai. Namun, saat ini Kota Kitakyushu telah berhasil menjadi kota yang bersih dan teratur. Bahkan, warga sudah dapat meminum air langsung dari keran-keran air rumah. Arti penting dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesamaan antara dua daerah yang potensial untuk kerjasama antar daerah dan membantu perkembangan mereka. Hal ini pula yang menjadikan penelitian tersebut terkait dengan penelitian kali ini dimana Kota Surabaya dan Kota Bandung memilih mitra kerjasama yang telah terbukti berhasil dalam melalui permasalahan kotanya seperti permasalahan lingkungan dan tata kelola perkotaan.

Dalam pelaksanaannya, unsur kerjasama antara Bandung dan Seoul terkait dengan *smart city*. Maka dari itu, penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian kali ini adalah penelitian dari penulis bernama Amal Muslim dengan

²⁶ Inggang Perwangsa Nuralam. 2018. *Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City dalam Menciptakan Surabaya Green City*. Diakses melalui <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JABA/article/view/807/555> (Jurnal, Universitas Brawijaya)

judul penelitian **“Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan Singapura dalam Pengembangan *Smart City* di Bidang Transportasi”**.²⁷

Kerjasama Singapura dalam pengembangan *Smart City* di Makassar dengan melakukan perbaikan dibidang transportasi dengan menggandeng IES (*Internasional Enterprise Singapore*) sendiri diikuti oleh negara se-Asia dan Singapura dibuka langsung oleh menteri perdagangan dan perindustrian. Investasi perusahaan swasta dari Singapura dapat dimanfaatkan secara maksimal demi menciptakan tatanan kota yang modern bebas dari kemacetan. Tantangan untuk pemerintah kota Makassar dalam menerapkan *Smart City* ialah dengan melakukan penyadaran kepada masyarakat betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif.

Pemerintah Makassar menerapkan manajemen *traffic* dianggap paling ideal atasi kemacetan yang terjadi di jalan-jalan protokol kota dengan sistem manajemen *traffic*. Surabaya terus melakukan perbaikan agar nantinya tercipta tatanan transportasi publik yang dapat mengurangi kemacetan dengan terus melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta yang berinvestasi. Dalam penelitian tersebut terlihat bahwa dalam mewujudkan sebuah kota berbasis *smart city*, terdapat pihak swasta yang terlibat dalam kerjasama yang dijalankan oleh Makassar dan Singapura.

Penelitian dengan judul **“Kerjasama *Sister City* Jakarta-Berlin dalam Bidang Kebudayaan pada Tahun 2011-2014”** yang ditulis oleh Rio Rusandi

²⁷ Amal Muslim. 2018. *Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan Singapura dalam Pengembangan Smart City di Bidang Transportasi*. Diakses melalui [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/Jurnal%20Fix%20Amal%20Muslim%20\(10-26-18-03-19-45\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/Jurnal%20Fix%20Amal%20Muslim%20(10-26-18-03-19-45).pdf) (Jurnal, Universitas Mulawarman)

ini adalah penelitian yang menjadi penelitian terdahulu terakhir yang terkait dengan penelitian kali ini.²⁸ Rio Rusandi sebagai penulis memberikan informasi bahwa kerjasama *Sister City* antara kedua kota tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kedua negara. Dalam menganalisa, penulis menggunakan dua konsep sebagai landasan yaitu Konsep *Sister City* dan Konsep *Paradiplomacy*. Kedua konsep ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa kerjasama yang dilakukan antara kedua tersebut Indonesia mampu melakukan promosi budaya hingga ke Jerman. Penulis menganggap hal ini menjadi salah satu strategi diplomasi Indonesia dalam melakukan penetrasi budaya Indonesia di Jerman. Penelitian tersebut dan penelitian kali ini sama-sama menggunakan konsep paradiplomasi dalam menganalisa kerjasama *sister city* antara dua kota, sehingga penelitian tersebut terkait dengan penelitian kali ini. Namun, dalam penelitian tersebut penulis fokus membahas kerjasama dalam bidang budaya sedangkan penelitian kali ini berfokus pada bidang tata kelola perkotaan.

Dari ke-10 (sepuluh) penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai kerjasama antara pemerintah daerah di satu kota dengan kota lain yang berada di negara berbeda menarik perhatian peneliti untuk melakukan membahas kerjasama tersebut khususnya kerjasama *sister city*. Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan tentang kerjasama *sister city*, penulis mencoba untuk memberikan gambaran berbeda dimana

²⁸ Rio Rusandi. 2017. *Kerjasama Sister City Jakarta-Berlin dalam Bidang Kebudayaan pada Tahun 2011-2014*. Diakses melalui [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/eJournal%20Rio%20Rusandi%20\(08-31-17-05-08-51\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/eJournal%20Rio%20Rusandi%20(08-31-17-05-08-51).pdf) (Jurnal, Universitas Mulawarman)

penelitian kali ini fokus pada kerjasama *sister city* Bandung-Seoul serta penulis mencoba melihat Strategi Kota Bandung dalam Tata Kelola Perkotaan Melalui Kerjasama Sister City Bandung-Seoul.

Tabel 1.1

Posisi Penelitian

No	Nama Penulis/Judul Penelitian	Jenis Penelitian/ Teori dan Konsep	Hasil Analisis
1	Rizki Tegar Sembada/Peluang dan Tantangan Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu (2014-2015)	Deskriptif/ <i>Sister city</i> , otonomi daerah, <i>paradiplomacy</i>	Sisi historis antara Kota Bandung dan Hamamatsu menimbulkan adanya peluang untuk melakukan kerjasama dimana Kota Bandung pernah berjasa dengan menolong tentara Jepang khususnya yang berasal dari kota Hamamatsu. Latar belakang antar keduanya inilah menjadi pendorong Kota Bandung dalam melakukan kerjasama. Adapula beberapa tantangan dalam melakukan kerjasama ini diantaranya : Format MoU yang kurang detail, lambatnya protokoler, kurangnya SDA, serta kurangnya sosialisasi
2	Mariyo Saputra/ Implementasi Kerjasama <i>Sister City</i> Bandung-Suwon terhadap Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Kota Bandung	Deskriptif/ Kerjasama internasional, <i>sister city</i> , konsep pembangunan	Dalam implementasinya terhadap Kota Bandung, kerjasama <i>sister city</i> antara Bandung-Suwon ini memiliki beberapa kendala yang menyebabkan kedua kota tersebut harus mengkhususkan kerjasama di bidang tertentu agar hasil

			<p>yang didapatkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pergantian pemerintahan yang sempat dilalui oleh Kota Bandung pun berdampak terhadap pengimplmentasiannya dimana terhentinya interaksi diantara keduanya.</p>
3	<p>Irdayanti/Substansi Kerjasama Luar Negeri <i>Sister City</i> Kota Surabaya-Xiamen</p>	<p>Deskriptif/<i>Sister city</i></p>	<p>Kerjasama <i>sister city</i> antara Surabaya dan Xiamen telah membuka banyak peluang besar bagi kota Surabaya khususnya dalam bidang perluasan pasar untuk mempromosikan potensi ekonomi <i>exchange</i>. Program ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti expo, exhibiton fair, dll. Bagi Xiamen, Surabaya telah berkontribusi di berbagai bidang termasuk pendidikan yang dilakukan melalui pertukaran pelajar. Adapula keuntungan lainnya yang didapatkan oleh keduanya. Hal ini pula membuktikan bahwa kerjasama yang dilakukan Xiamen-Surabaya ini membuahkan hasil yang baik bagi keduanya.</p>
4	<p>Hendri Renola Fitri/Implementasi Kerjasama <i>Sister City</i> Bandung-Braunschweig (2000-2013)</p>	<p>Deskriptif / <i>Sister city, Transnational cooperation</i></p>	<p>Kesamaan karakteristik kedua kota seperti Bandung dan Braunschweig dapat menimbulkan keuntungan jangka panjang ataupun pendek apabila dapat dimanfaatkan melalui kerjasama dalam menggapai</p>

			<p>kepentingan bersama. Kesamaan ini akan memunculkan ketergantungan sensitif. Kolaborasi ini hanyalah bentuk kerjasama untuk meningkatkan potensi masing-masing sehingga prosesnya akan melahirkan hasil yang lebih efektif dan efisien.</p>
5	<p>Atika Dian Anggraini/ Kinerja Pemerintah DKI Jakarta Dalam Kerjasama <i>Sister City</i> dengan Seoul di Bidang Perdagangan</p>	<p>Deskriptif/ <i>Policy Process Analysis</i> (Variabel Input, Variabel Proses, dan Variabel Output)</p>	<p>Penerapan model evaluasi menggunakan tiga variabel yaitu variabel input, proses, dan output serta indikator-indikator yang terbagi didalamnya dapat digunakan untuk melihat kinerja Pemerintah DKI Jakarta yang ternyata melalui model evaluasi tersebut dapat dilihat bahwa kerjasama <i>sister city</i> Jakarta-Seoul menghasilkan kerjasama perdagangan yang efektif dan saling menguntungkan.</p>
6	<p>Muhammad Nurckhalik Djiirimu/Peluang dan Tantangan Kerjasama <i>Sister City</i> Kota Baubau-Seoul</p>	<p>Deskriptif/ <i>Decision Making Theory, Multirack Diplomacy, Sister City</i></p>	<p>Kerjasama antara Kota Baubau dan Seoul menjadi berkembang dengan berhasilnya misi penyelamatan bahasa suku Cia-Cia yang menurut ahli linguistik terancam punah melalui penggunaan huruf hangul. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi dalam <i>kerjasama sister city</i> Kota Baubau-Seoul adalah Pemerintah Kota Baubau terlalu pasif dalam kerjasama</p>

			ini hal ini dikarenakan kontrol lembaga-lembaga dan masyarakat sipil atas aktivitas-aktivitas Korea di Kota Baubau.
7	Selvina Novintan Putri/ Kegagalan Kerjasama <i>Sister City</i> Kota Semarang dengan Kota Beihai	Deskriptif/ <i>Sister City</i>	Selain karena adanya kesamaan karakteristik, Pemerintah Kota Semarang melakukan kerjasama <i>sister city</i> dengan Beihai karena melihat kemampuan Beihai dalam melakukan pembangunan di beberapa sektor. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama <i>sister city</i> yaitu: Kendala dalam penguasaan bahasa asing, batasan dalam kunjungan, perizinan, serta kurangnya pendampingan dari provinsi, belum ada keterlibatan pihak <i>Non-Government</i> , mutasi dari penanggungjawab program kerjasama, tidak adanya pengawasan lanjutan dan kendala dalam kelembagaan penyelenggara kerjasama <i>Sister City</i> serta hambatan dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
8	Inggang Perwangsa Nuralam/ Peran Strategis Penerapan Konsep <i>Sister City</i> dalam Menciptakan Surabaya Green City	Deskriptif/ <i>Sister City, Green City</i>	Untuk mengidentifikasi kesamaan antara dua daerah yang potensial untuk kerjasama antar daerah dan membantu perkembangan mereka. Hal ini pula yang menjadikan penelitian tersebut terkait dengan penelitian kali ini dimana

			Kota Surabaya dan Kota Bandung memilih mitra kerjasama yang telah terbukti berhasil dalam melalui permasalahan kotanya seperti permasalahan lingkungan dan tata kelola perkotaan.
9	Amal Mulsim/ Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan Singapura dalam Pengembangan <i>Smart City</i> di Bidang Transportasi”	Deskriptif/ <i>Smart City</i>	Kota Makassar berupaya untuk mewujudkan sebuah tatanan kota berbasis <i>smat city</i> . Dalam hal ini, bidang transportasi merupakan bidang yang menjadi pokok penting terlebih karena kota Makassar memiliki permasalahan kemacetan di kotanya. Untuk mewujudkan suatu transportasi kota berbasis “ <i>Smart</i> ”. Kota Makassar memilih Singapura sebagai mitra kerjasama. Singapura merupakan salah satu kota di Asia Tenggara yang terkenal dengan kecanggihan teknologinya. Singapura saat ini sudah menggunakan MRT dan LRT sebagai transportasi umumnya. Hal inilah yang menjadikan Makassar memilih Singapura sebagai mitra kerjasama. Dalam upaya mewujudkan <i>Smart City</i> khususnya dalam bidang transportasi tersebut, kerjasama antara keduanya melibatkan pihak swasta yaitu IES.

10	Rio Rusandi/ Kerjasama <i>Sister City</i> Jakarta-Berlin dalam Bidang Kebudayaan pada Tahun 2011- 2014	Deskriptif / <i>Sister City</i> , <i>paradiplomacy</i>	Dalam implementasinya, telah banyak terwujudnya kerjasama dalam berbagai bidang yang salah satunya adalah kebudayaan. Beberapa kegiatan kebudayaan rutin dilakukan oleh Jakarta dan Berlin yang melibatkan aktor penting. “Berlin X Jakarta-Urban Art Project” dan “Jakarta Art Festival” merupakan bentuk kegiatan yang terkait langsung dengan kerjasama dimana Indonesia mempromosikan budaya di Berlin serta adanya kolaborasi kebudayaan Jakarta dan Berlin.
----	---	---	---

1.5 Landasan Teori / Konsep

1.5.1 Konsep *Paradiplomacy*

Konsep ini merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. *Paradiplomacy* ini menjelaskan perilaku entitas *sub-state* atau pemerintah regional/pemda dalam melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.²⁹ Paradiplomasi muncul sebagai akibat dari hadirnya era globalisasi. Pada era ini, bukan hanya negara yang dapat berperan dalam kancah hubungan internasional, aktor-aktor baru juga bermunculan dan yaitu diantaranya adalah pemerintah daerah. Hadirnya pemerintah daerah sebagai aktor baru dalam

²⁹ Stefan Wolf. 2009. *Paradiplomacy: scope, opportunities and challenges*. Nottingham: University of Nottingham hal 1-2 dan 13

hubungan internasional diharapkan dapat membantu proses pembangunan negara.

Istilah *paradiplomacy* pertama kali muncul dalam perdebatan Istilah “paradiplomasi” pertama kali muncul dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Bosque, Panayotis Soldatus tahun 1980 –an sebagai penggabungan istilah “*parallel diplomacy*” menjadi “*paradiplomacy*” yang mengacu pada makna “*the foreign policy of non- central governments* “ menurut Aldecoa, Keating dan Boyer.³⁰

Dengan terlibatnya pemerintahan lokal dalam melaksanakan hubungan dengan pihak luar negeri, mengakibatkan pemerintahan pusat harus dapat melakukan *information sharing* dengan pemerintahan lokal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah tetap harus melaporkan kepada pemerintah pusat mengenai pelaksanaan paradiplomasi yang dijalin. Hal ini bertujuan agar koordinasi antara *state* dan *sub-state* tetap sejalan dengan kepentingan nasional.³¹

Paradiplomasi ini mengacu pada perilaku entitas “*sub-state*” (pemerintah lokal atau pemerintah daerah) dalam melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka secara spesifik.³²

³⁰ David Crikemas. 2008. *Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*. Diakses melalui <https://repository.uantwerpen.be/desktop/irua/core/index.phtml?language=E&euser=&session=&service=opacirua&robot=&deskservice=desktop&desktop=irua&workstation=&extra=loi=c:irua:69472> (05/05/2018)

³¹ Mufidah Fahri. 2018. *Dinamika Kerjasama Kota Bandung-Braunschweig dalam Kerangka Sister City*. Diakses melalui http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODUyZWY0NTRmZDEzMDe3YmExOGUxMjA5MWYyZDEzNmRhMGU0MTA5NA==.pdf (29/09/2019)

³² Stefan Wolff. *Op.cit.* Hal 2

Dorongan bagi pemerintah daerah atau regional dalam melakukan hubungan kerjasama dengan pihak asing tidak dapat terlepas dari lingkungan baik domestik maupun internasional. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya paradiplomasi, yaitu:³³

1. Dorongan segmentasi baik atas dasar objektif antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub-nasional tersebut berada maupun atas dasar persepsi yang berkaitan dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.
2. Adanya ketidakseimbangan keterwakilan unit-unit sub nasional pada unit nasional dalam hubungan luar. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub nasional mampu mendorong pemerintah sub nasional untuk melakukan ekspansi perannya.

Prinsip kerjasama antar daerah kota ini diharuskan untuk berdasarkan pada beberapa prinsip yang tercantum dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu efesiensi, efektivitas, sibergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan serta mencakup kepastian hukum. Kegiatan paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah juga terbagi dalam beberapa bentuk, seperti:³⁴

³³ Rizki Tegar Sembada. *Op. Cit.*

³⁴ Rio Rusandi. *Op.cit.*

1. Pembentukan *sister city*,
2. FDI (*foreign direct investment*),
3. Pembentukan proyek bersama, dan
4. Pengiriman delegasi

Selain terbagi dalam beberapa bentuk, paradiplomasi ini juga terbagi dalam beberapa tipe, yaitu:³⁵

1. *Transborder paradiplomacy* yang mana terjadi pada suatu hubungan diplomasi yang dilakukan oleh aktor sub nasional yang berbatasan langsung secara geografis,
2. *Transregional Paradiplomacy*, tipe ini terjadi ketika hubungan diplomasi dilakukan oleh aktor *sub-state* yang berbeda dalam satu kawasan, namun tidak berbatasan langsung, dan
3. *Global Paradiplomacy*, tipe terakhir ini merupakan hubungan diplomasi antar aktor *sub state* yang berasal dari kawasan yang berbeda

Seperti halnya kerjasama Bandung-Seoul. Kedua kota ini adalah perwakilan politik yang memiliki kekuatan dalam pembuatan kebijakan serta bertukar informasi demi meraih kepentingan satu sama lain. Kerjasama para diplomasi yang dilakukan oleh Kota Bandung dan Kota Seoul merupakan kerjasama yang masuk dalam kategori *Sister City*. Jika dilihat melalui letak geografis, Kota Bandung dan Seoul memiliki jarak geografis yang cukup jauh dan tidak berada dalam satu kawasan dimana Bandung terletak di kawasan Asian Tenggara sedangkan Seoul terletak di dalam kawasan Asia Timur. Letak

³⁵ *Ibid.*

geografis yang berjauhan ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh keduanya merupakan kerjasama paradiplomasi tipe *Global paradiplomacy*. Konsep *paradiplomacy* dapat menjelaskan bahwa Kota Bandung memiliki wewenang untuk bekerjasama dengan pihak luar negeri tanpa adanya ikut campur tangan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadikan hubungan kerjasama demi pembangunan negara menjadi lebih efisien serta membantu Kota Bandung dan Seoul mencapai kepentingan masing-masing.

1.5.2 *Smart City*

Dalam melakukan kerjasama paradiplomasi khususnya *sister city*, Bandung dan Seoul menyepakati untuk melakukan kerjasama dan pertukaran informasi yang berfokus pada pengembangan *Smart City* dalam beberapa bidang. Konsep kota cerdas atau *smart city* dikembangkan sebagai salah satu konsep penataan kota-kota di dunia beberapa tahun belakangan ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. *Smart city* merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.³⁶

Definisi *smart city* sendiri sangat beragam karena implementasinya disetiap kota atau daerah pun seringkali berbeda-beda. Menurut Yang (2012), *smart city* berarti Are perkotaan yang menciptakan pembangunan ekonomi

³⁶ Bagian Kerjasama Kota Bandung. *Profil Smart City*. Diakses melalui <http://kerjasama.bandung.go.id/profil/smart-city> (11/02/2019)

berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya dengan meningkatkan 6 hal pokok (pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi) yang dapat dilakukan dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang kuat. Sedangkan dalam buku Schaffers (2010) A.Caragliu, dkk mengatakan bahwa “Kami percaya suatu kota dapat dikatakan cerdas apabila investasi modal manusia dan sosial serta infrastruktur komunikasi tradisional (transportasi) dan modern (IC) memicu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi, dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, melalui tata kelola yang partisipatif).³⁷ Meski terlihat bahwa definisi tentang *smart city* sangat beragam namun terlihat adanya kesamaan bahwa implementasi konsep *smart city* dalam perencanaan kota adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di perkotaan seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi.

Negara yang menjadi pionir konsep *smart city* dunia adalah negara Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. *International Business Machines* (IBM) merupakan perusahaan Amerika Serikat yang menaungi berdirinya *smart city*. IBM membagi *smart city* menjadi enam dimensi yang meliputi:³⁸

³⁷ Tim PSPPR UGM. 2017. *Road Map Kota Yogyakarta Menuju Smart City*. Diakses melalui https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta_UPLOAD_web-1.pdf (11/02/2019)

³⁸ Abdul Rauf. 2016. *Sistem Perpustakaan Menggunakan Radio Frequency Identification (RDFI) dengan Pendekatan Smart City (Studi Kasus: Perpustakaan Wilayah Soeman HS, Provinsi Riau)*.

1. *Smart People*

Dimensi *smart people* menurut IBM adalah dimensi utama yang harus dicapai dalam mewujudkan *smart city*. Terdapat kriteria untuk proses kreatifitas pada manusia dan modal sosial dalam dimensi ini. Kriteria penilaian *smart people* tersebut antara lain mencakup (1) Tersedianya tingkat pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang secara merata kepada masyarakat dan berbasis IT seperti penerapan *e-learning*, pemanfaatan sistem informasi sekolah/perguruan tinggi, pembelajaran dengan fasilitas komputer, penyediaan fasilitas akses internet untuk sumber informasi/pembelajaran, dan lain-lain (2) Keberadaan komunitas IT dan komunitas lainnya terkait pemanfaatan teknologi informasi (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan IT

2. *Smart Economy*

Dalam mengimplementasikan dan menilai *smart city* pada dimensi *smart economy* dapat dilakukan dengan memenuhi dua hal, yaitu proses inovasi (*innovation*) dan kemampuan daya saing (*competitives*). Kedua hal ini penting untuk peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan cerdas. Hal ini dikarenakan inovasi dan kemampuan daya saing adalah komponen utama untuk meningkatkan pembangunan sumber daya alam.

3. *Smart Governance*

Dimensi *smart city* yang satu ini mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat diharapkan

dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik.

4. *Smart Mobility*

Smart Mobility merupakan salah satu dimensi dari *smart city* yang berfokus pada penyediaan sarana dan fasilitas transportasi serta mobilitas masyarakat. Pada dimensi ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang cerdas, sehingga layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik diharapkan dapat tercipta serta mengurangi kompleksitas publik dalam transportasi, seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, polusi, dan lainnya.

5. *Smart Environment*

Lingkungan cerdas adalah bagian atau dimensi dari *smart city* yang berfokus pada bagaimana menciptakan lingkungan yang baik dalam proses pengembangan *smart city* yang sering kali menggunakan teknologi yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Kriteria penilaian disini mencakup proses menyelesaikan dan mengelola sumber daya yang lebih baik. Untuk menciptakan lingkungan yang cerdas, berbagai aplikasi dan komputer diperlukan dalam bentuk jaringan sensor dan jaringan sensor nirkabel, jaringan komputer, kecerdasan buatan, sistem berbasis data, komputasi seluler, sistem operasi, komputasi paralel, pengenalan wajah dan gambar, sistem transportasi cerdas, dan berbagai teknologi lain yang terkait dengan konservasi lingkungan maupun manusia itu sendiri.

6. *Smart Living*

Dalam dimensi *smart living*, terdapat persyaratan serta tujuan untuk proses mengelola kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan cerdas. Untuk menciptakan kehidupan cerdas, ada tiga buah sub-bagian yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut: (1) Fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan fasilitas akses internet gratis dan sehat, CCTV yang dipasang di ruang publik dan lalu lintas agar menekan jumlah kriminalitas. (2) Penyediaan fasilitas, infrastruktur dan informasi terkait potensi wisata lokal dengan baik dan menarik, memanfaatkan IT seperti adanya keberadaan sistem informasi geografis untuk memetakan lokasi wisata, proses pemesanan tiket dan kamar hotel menjadi lebih mudah (sistem daring). (3) Adanya sarana IT yang memadai, agar fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan teknologi informasi.

Kerjasama *Sister City* Bandung-Seoul memang berbasis pada *smart city*, namun dari keenam dimensi *smart city* yang telah disebutkan diatas, dimensi-dimensi yang termasuk dalam kerja sama *Sister City* Bandung dan Seoul dan memiliki keterlibatan dengan pihak swasta adalah dimensi *smart branding*, *smart environment* dan *smart living*.

1.5.3 Public Private Partnership (PPP)

Dalam upaya menjadikan sebuah kota berbasis *smart city* melalui kerjasama *sister city*, Bandung tidak hanya melibatkan Seoul, namun juga melibatkan pihak swasta dalam kerjasama tersebut. Perjanjian kontrak antara sebuah badan politik dan sebuah entitas swasta, yang mana akan dibagi aset

dan kemampuan dari tiap pihak dalam mengoperasikan sebuah fasilitas atau jasa, dalam periode waktu yang panjang (20-30 tahun atau lebih) disebut sebagai *Public Private Partnership* (PPP), Menurut *United Kingdom Foreign & Commonwealth Office*.³⁹

Untuk mendukung optimalisasi penerapan skema PPP, pemerintah Indonesia juga telah membuat berbagai paket peraturan perundang-undangan pendukung. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.⁴⁰

Didalam bukunya, Seuzan Lee mengatakan bahwa *Public Private Partnership* adalah :

*“A voluntary alliance between various equal actors from different sectors whereby they agree to work together to reach common goal or fulfill a specific need that involves shared risk, responsibilities, means and competencies”*⁴¹

Pernyataan ini berarti bahwa PPP adalah aliansi yang bersifat sukarela antara banyak aktor yang berasal dari sektor berbeda-beda dimana sesama aktor setuju untuk berkerja bersama untuk meraih kepentingan bersama atau

³⁹ Suaibatul Aslamiyah. *Model Partnership Sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih*. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/77125-ID-model-partnership-sebagai-upaya-strategi.pdf> (08/05/2018)

⁴⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2016. *Penerapan Sistem Public Private Partnership dalam Proyek Pembangunan Energi Listrik*. Jakarta: Pengayoman

⁴¹ Seuzan Lee. 2006. *Public Private Partnership in Education EdInvest*. Diakses melalui <https://www.nuffic.nl/en/library/public-private-partnership-in-education.pdf> hal. 8

memenuhi kebutuhan khusus yang melibatkan berbagi resiko, tanggung jawab, alat-alat, serta kompetensi bersama.

Seuzan Lee juga mengatakan bahwa PPP biasanya hanya melibatkan dua pihak yaitu *public* dan *private* atau pemerintahan dan swasta. Tetapi, seringkali terjadi kerjasama atau *partnership* yang melibatkan lebih dari dua pihak dan terdiri dari tiga pihak yaitu publik, privat, dan masyarakat atau pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.⁴² Dalam konteks tujuan pembangunan nasional disebuah negara, ketiga pihak yang terkait dalam kerjasama akan membawa keunggulan peran dan fungsi yang berbeda yang kemudian masing-masing keunggulan tersebut di kombinasikan dalam upaya mencapai hasil yang maksimal.

Terdapat beberapa faktor pendorong pemerintah untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta ini diantaranya karena terbatasnya anggaran dana, efesiensi dan efektivitas pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sehingga, pemerintah membutuhkan pihak lain agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Proses kerjasama yang terjalin dalam *Public Private Partnership* dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu melalui:⁴³

⁴² Nikmah Nurbaity. 2016. *Public Organization Private Partnership: studi Tentang Kemitraan Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Purworejo*. Desertasi. Salatiga: Studi Pembangunan Program Pascasarjana. Uiversitas Kristen Satya Wacana.

⁴³ Pusat Penelitian Politik. 2016. *Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Diakses melalui <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia> (08/05/2018)

1. *Service Contract*, yaitu kerjasama antara publik dan privat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu 1-3 tahun. Privat sebagai pemilik aset dan penanggung jawab finansial secara penuh.
2. *Management Contract*, kerjasama dilakukan ada tingkatan operasional manajemen dan maintance dengan jangka panjang waktu 3-8 tahun. Privat sebagai pemilik aset, investor, dan bertanggung jawab atas finansial.
3. *Lease Contract*, kerjasama antar publik dan privat dalam jangka waktu 10-15 tahun dimana tanggung jawab manajemen, operasional dan pembeharuan kontrak lebih spesifik. Publik adalah pemilik modal namun pihak swasta turut menanggung resiko keuangan.
4. *Concession*, dengan jangka waktu 20-30 tahun, kerjasama ini melibatkan publik dan swasta dimana keduanya adalah pemilik modal. Pihak swasta menjadi penanggungjawab dalam operasional, pemodal, memelihara, dan bertanggungjawab atas resiko sepenuhnya. Pihak swasta mendapatkan kompensasi secara penuh dan pihak publik meningkatkan efesiensi operasional dan pengembangan SDMnya.
5. *Build Operate Transfer* (BOT), adalah kerjasama PPP yang komponen utamanya adalah meningkatkan layanan publik dengan investasi dari pihak swasta. Kerjasama ini memiliki jangka waktu 20-30 tahun. Posisi pihak swasta sebagai penanggungjawab operasi, pemelihara, pemodal, dan penanggung jawab risiko dan pihak swasta juga mendapatkan imbalan sesuai dengan parameter produksinya.

6. *Joint venture Agreement*, adalah kerjasama dimana investasi dan resikonya ditanggung bersama antara pemerintah dan pihak swasta. Batasan waktu hanya berdasarkan kesepakatan bersama. Kerjasama ini melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, non pemerintah, swasta, dan sebagainya ataupun *stakeholder* terkait.

7. *Community Based Provision*, merupakan kerjasama individu/komunitas/perusahaan kecil yang mempresentasikan kepentingan tertentu dengan merundingkan kepentingan tersebut kepada pemerintah maupun lembaga non-pemerintah

Penulis melihat bahwa konsep *Public Private Partnership* ini dapat digunakan dalam menjelaskan strategi Kota Bandung dalam pengelolaan tatanan kota dimana Kota Bandung melaksanakan kerjasama dengan Kota Seoul serta melibatkan pihak lainnya yang merupakan pengusaha swasta dari Korea Selatan yang turut membantu Kota Bandung dalam mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaannya pula, strategi PPP yang menjelaskan strategi Kota Bandung dalam penataan kota ada *Joint Venture Agreement* dimana Kota Bandung, Seoul, dan pihak swasta sama-sama menanggung risiko kerjasama dan juga jangka waktu pelaksanaan berdasarkan pada perjanjian yang ditetapkan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis.⁴⁴ Dalam kata lain, penelitian kualitatif ini merupakan sebuah metode yang tidak mengadakan perhitungan. Metode ini dipilih karena penulis ingin menggambarkan strategi *paradiplomacy* Kota Bandung dalam pengelolaan tatanan kota melalui kerjasama *sister city* Bandung-Seoul tersebut dijelaskan berdasarkan analisis kajian pustaka yang tidak menggunakan metode perhitungan.

1.6.2 Teknik Analisa Data

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan teknik analisa deduktif. Teknik analisa data jenis deduktif ini merupakan proses pendekatan yang diawali dengan mencaari sebuah kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian mengkhususkan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan menggunakan kaidah logika tertentu.⁴⁵

Terdapat tiga tahap analisa data yang akan penulis lakukan dalam menganalisa data pada penelitian kali ini, yang pertama adalah dengan mereduksi data, mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian kemudian diolah dengan menyeleksi atau membatasi sumber-sumber yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan studi kasus yang penulis teliti.

Indikator yang digunakan penulis dalam mereduksi data didasarkan pada berbagai isu yang berkaitan dengan topik yaitu mengenai kerjasama *sister city*

⁴⁴ Lexy Moelong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal. 4

⁴⁵ Syarifudin Anwar, 2013, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal.40

Bandung-Seoul, strategi kota Bandung melibatkan pihak swasta, keterlibatan pihak swasta dalam proyek proyek tata kelola perkotaan Bandung. Kemudian yang kedua adalah penyajian data, tahapan ini adalah tahap dimana penulis menyajikan ringkasan singkat dari sekumpulan informasi yang pada akhirnya memberi kemungkinan untuk penarikan kesimpulan.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup diperlukan oleh penulis untuk memberikan batas atas permasalahan yang akan diangkat serta demi menghindari melebar luasnya pembahasan diluar konteks yang dimaksudkan agar penelitian tetap fokus. Berikut adalah ruang lingkup penelitian dalam penelitian kali ini:

a. Batasan Waktu

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi waktu penelitian antara tahun 2015-2018. Pada tahun 2015, Bandung dan Seoul pertama kali melakukan penandatanganan *LoI* yang menjadi awal mula terbentuknya kerjasama antara keduanya. Kerjasama *sister city* tersebut memiliki batasan waktu yaitu selama 4 (empat) tahun. Sehingga, pada tahun 2018 kontrak kerjasama antara kedua negara sudah habis tempo dan dapat diperpanjang apabila disetujui oleh kedua kota.

b. Batasan Materi

Terkait dengan penelitian ini, penulis membatasi materi penelitian pada strategi yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung melalui kerjasama *sister city* Bandung-Seoul serta hal-hal yang melatarbelakangi terbentuknya kebijakan tersebut.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari studi pustaka dan wawancara narasumber. Studi pustaka yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersedia dan juga terpercaya serta akurat. Data-data yang dimaksud yaitu data yang berasal dari buku, jurnal, karya, ilmiah, maupun data-data yang tersedia di internet melalui website-website resmi seperti pemerintahan, pendidikan, sumber berita, maupun dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan informasi melalui wawancara dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari pemerintah Kota Bandung terkait, yaitu Bagian Kerjasama Kota Bandung dan melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.5 Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dilapangan melalui wawancara narasumber di Bagian Kerjasama Kota Bandung. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai literatur, dokumen dan hasil yang diperoleh dari berbagai sumber.

1.7 Argumen Pokok

Argumen pokok peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa bentuk kegiatan paradiplomasi yang dilakukan oleh Kota Bandung ialah kerjasama *Sister City*. Demi mewujudkan kepentingan Kota Bandung yaitu tata kelola perkotaan dan mewujudkan sebuah kota cerdas (*smart city*), Bandung memilih Seoul sebagai mitra kerjasamanya. Dalam kerjasama tersebut terdapat 3 (tiga)

dimensi *smart city* yaitu *smart branding*, *smart living* dan *smart environment*. Seoul yang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Korea Selatan memang telah menunjukkan keberhasilannya dalam pengelolaan tatanan kota. Hal inilah yang mendorong Kota Bandung melakukan kerjasama dengan Kota Seoul dengan harapan dapat meraih keberhasilannya seperti Seoul.

Adapun strategi Kota Bandung dalam melaksanakan kerjasama ini yaitu melibatkan pihak pengusaha-pengusaha yang berasal dari Korea Selatan. Dengan adanya keterlibatan perusahaan swasta ini, maka terdapat pihak publik dan privat dalam kerjasama sehingga strategi Kota Bandung dapat dikategorikan sebagai kerjasama *public private partnership* dengan jenis pelaksanaan yaitu *joint venture agreement*. Kota Bandung semakin percaya diri dalam melaksanakan kebijakannya dan meraih kesuksesan melalui kerjasama *sister city* Bandung-Seoul.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian terbagi atas 5 (lima) bab utama sebagai bagian dari isi penelitian, antara lain:

BAB I membahas latar belakang permasalahan dari isu yang diangkat dalam penelitian kali ini. Pada bab ini juga diuraikan penunjang kerangka penelitian yaitu rumusah masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan konseptual yang digunakan yaitu Konsep Paradiplomasi, *Smart City*, dan *Public Private Partnership*. Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik analisa data, teknik pengumpulan

data, serta jenis data akan dijabarkan pada bab ini. Pada bagian akhir akan dilengkapi dengan argumen pokok dan sistematika penelitian

BAB II menggambarkan permasalahan pada tata kelola perkotaan yang dihadapi Kota Bandung sebelum menjalani kerjasama *sister city* dengan Kota Seoul. Hal ini bertujuan untuk melihat urgensi Kota Bandung dalam tata kelola perkotaan hingga perlu dilaksanakannya kerjasama. Selain itu, bab ini juga akan mengulas tahapan-tahapan terbentuknya kerjasama *sister city* Bandung Seoul. Pada akhir bab ini penulis menguraikan faktor yang menjadi pendorong Kota Bandung memilih Seoul sebagai mitra kerjasama serta mengulas substansi kerjasama *sister city* Bandung-Seoul secara umum.

BAB III menguraikan konsep *smart city* yang diterapkan Kota Bandung mengingat bahwa *sister city* Bandung-Seoul berfokus pada pengembangan *smart city*. Penulis akan memaparkan dimensi-dimensi *smart city* Kota Bandung karena pengimplementasian *smart city* seringkali berbeda-beda di setiap kota. Kemudian pada bab selanjutnya akan dijelaskan upaya Kota Bandung dalam melibatkan pihak swasta Korea Selatan pada pengembangan *smart city* melalui kerjasama *sister city* Bandung-Seoul.

BAB IV menjelaskan lebih rinci mengenai hasil dari upaya Kota Bandung melibatkan pihak swasta dalam pengembangan *smart city* melalui *sister city* Bandung-Seoul dengan menggunakan skema *public private partnership*. Keterlibatan pihak swasta Korea Selatan tersebut akan dijelaskan dengan proyek pembangunan Kota Bandung dalam tata kelola perkotaan melalui

beberapa dimensi *smart city* yaitu *smart living*, *smart branding*, dan *smart environment*.

BAB V berisi kesimpulan yang mengacu pada hasil penelitian dan juga disertai dengan saran untuk penelitian lanjutan

